

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas yang diemban. Dinas Kesehatan Kota Ambon yang ditugaskan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon No. 9 Tahun 2008 merupakan salah satu elemen dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatannya terdiri dari satu Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang Teknis yaitu (1.) Program, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, 2.) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan 3.) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja adalah Rencana Strategik (Renstra), Tugas-tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dimana perlu dievaluasi lingkungan strategis untuk mengetahui faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja. Faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat berasal dari sisi internal yang berupa kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakneses*). Faktor internal ini untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan seberapa besar pula kelemahan yang harus diatasi.

Sedangkan faktor eksternal berupa Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang mungkin timbul dari lingkungan luar organisasi, tetapi diperkirakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja. Perencanaan strategis yaitu Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan.

Dalam mengukur kinerja perlu ditetapkan indikator kinerja yang terdiri dari masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), Manfaat (*Benefits*) dan Dampak (*Impacts*) dari setiap kegiatan. Evaluasi kinerja diukur dari evaluasi kinerja kegiatan, program, kebijakan, sasaran dan tujuan sedangkan nilai capaian akhir diukur berdasarkan nilai capaian kerja dikalikan dengan bobot kerja dibagi 100 %.

Hasil evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Ambon dilihat dari tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) relatif berhasil, walaupun masih terdapat kendala dan masalah yang perlu segera ditangani dan diselesaikan.

Untuk itu perlu dibuat strategi pemecahan masalah guna mengatasi kendala dan masalah dengan jalan melakukan konsolidasi internal, membuat program/kegiatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan dan menjalin hubungan kerja yang baik dengan mitra kerja serta koordinasi dengan instansi terkait.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Penyediaan informasi guna pengelolaan kinerja dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud dari pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan pendorong terwujudnya good governance. LAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. LAKIP disusun dan disampaikan secara tertulis,

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini diatur dalam Peraturan Presiden RI No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan laporan kinerja Tahunan sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik, yaitu:

1. Sebagai laporan Tahunan.
2. Sebagai suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja Instansi Pemerintah dalam kurun waktu satu Tahun.

Peraturan Daerah Kota Ambon No. 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Ambon, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kesehatan. Adapun uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi adalah sebagai berikut:

a. Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Kesehatan

Secara prinsip sistem pemerintahan desentralisasi merupakan penyerahan urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam aplikasinya di sektor kesehatan, desentralisasi semakin mendorong Dinas Kesehatan menjadi lembaga yang berfungsi menyusun kebijakan dari aspek teknis pembangunan kesehatan dengan mengedepankan upaya-upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Dalam Peraturan Daerah Kota Ambon No.4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Ambon dan Peraturan Walikota Ambon No.38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas kota Ambon. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dan .Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Ambon sesuai Peraturan Walikota Ambon Tahun 2016 dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Kota Ambon mempunyai tugas pokok sebagai berikut; masing-masing bidang dan seksi melaksanakan program dan kegiatan mengacu pada uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Kesehatan Kota Ambon serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan kota Ambon Tahun 2017-2022. Seiring dengan berakhirnya Tahun anggaran 2017, maka Dinas Kesehatan perlu membuat Laporan kinerja Instansi untuk melihat sejauh mana keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017. Dibanding dengan target kinerja yang telah ditetapkan, kendala, dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program, serta analisis pemecahan masalah dan untuk kepentingan pengambilan keputusan Tahun-Tahun berikutnya.

▪ **Sekretariat Dinas Kesehatan**

Sekretariat merupakan unsur staf. Sekretariat sebagaimana dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan serta pelayanan administratif. Sekretariat Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Kesehatan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada Dinas Kesehatan
4. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan kepegawaian;
5. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
6. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;
7. Pembinaan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
8. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik /kekayaan Negara/daerah, penyusunan laporan kinerja organisasi;dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Kesehatan terdiri atas:

1. Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian Dan Umum;dan
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Sub Bagian Perencanaan, kepegawaiandan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Sekretariat Dinas Kesehatan dalam menyiapkan bahan kebijakan perencanaan, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Kesehatan. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Kesehatan dalam menyiapkan bahan kebijakan keuangan dan aset daerah di lingkungan Dinas Kesehatan.

▪ **Bidang Kesehatan Masyarakat**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat. Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta promosi dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
3. keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja
4. dan olahraga serta promosi dan pemberdayaan masyarakat;
5. Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta promosi dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta promosi dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat memiliki beberapa seksi dibawahnya, yaitu:

a) Seksi Kesehatan Keluarga Gizi

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- 2) Melaksanakan pengawasan dan membantu kegiatan yaitu data kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi dikumpulkan dari ke puskesmas dan rumah sakit dan dokter, bidan praktek diolah menjadi data rekapan untuk mewujudkan sasaran yang efisien, efektif dan akurat;
- 3) Mengelola sistem informasi pelayanan kesehatan;
- 4) Memantau evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga memiliki tugas:

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;

- 2) Menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- 3) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga dengan instansi terkait;
- 4) Mengelola sistem informasi pelayanan kesehatan;
- 5) Memantau evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan program promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- 4) Memantau evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas beberapa seksi yaitu:

- a) Seksi Surveilans dan Imunisasi, yang mempunyai tugas:
 - 1) Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
 - 2) Mengumpul dan mengolah data program terkait epidemiologi penyakit potensial KLB (Kejadian Luar Biasa), wabah dan data imunisasi;
 - 3) Melakukan analisis data program terkait epidemiologi penyakit potensial KLB & wabah dan data imunisasi;
 - 4) Memantau evaluasi dan pelaporan kegiatan surveilans dan imunisasi; dan
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas:
 - 1) Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - 2) Melakukan koordinasi kegiatan penemuan penderita, pengobatan dan pencegahan dalam penanggulangan penyakit menular;
 - 3) Melaksanakan manajemen logistik kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - 4) Melaksanakan *quality assurance* laboratorium kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - 5) Memantau evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan

- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- c) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas:
 - 1) Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa;
 - 2) Melakukan koordinasi kegiatan penemuan penderita, pengobatan dan pencegahan dalam penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - 3) Melaksanakan manajemen logistik kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - 4) Melaksanakan quality assurance laboratorium kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - 5) Melaksanakan pelatihan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - 6) Memantau evaluasi dan Pelaporan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

▪ **Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Tugas umum dalam Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan yaitu melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan serta pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Fungsi yang dilaksanakan dalam bidang ini adalah:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan serta pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan serta pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan

tradisional, kefarmasian, alat kesehatan serta pengembangan Sumber Daya Manusia.

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan serta pengembangan Sumber Daya Manusia.

a) Seksi Pelayanan Kesehatan:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional
2. Mengelola dan mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
3. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dasar meliputi upaya kesehatan perorangan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya, upaya kesehatan komunitas, upaya kesehatan masyarakat, memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
4. Menganalisa data-data yang diberikan dari Puskesmas untuk pemecahan masalah, merangkum semua laporan dari Puskesmas, Rumah Sakit, Perawatan Kesehatan Masyarakat, dalam penilaian kinerja pelayanan kesehatan
5. Melaksanakan monitoring ke Rumah Sakit dan Klinik serta merekap hasil monitoring untuk digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan di lapangan
6. Melaksanakan pembuatan Surat Ijin Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Bidan dan Perawat
7. Melaksanakan pembuatan Surat Ijin Rumah Sakit, Klinik, Balai Pengobatan dan melaksanakan pemeriksaan di lokasi Rumah Sakit, Klinik dan Balai Pengobatan
8. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan akibat wabah dan bencana
9. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
10. Mengevaluasi semua kegiatan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan

b) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan:

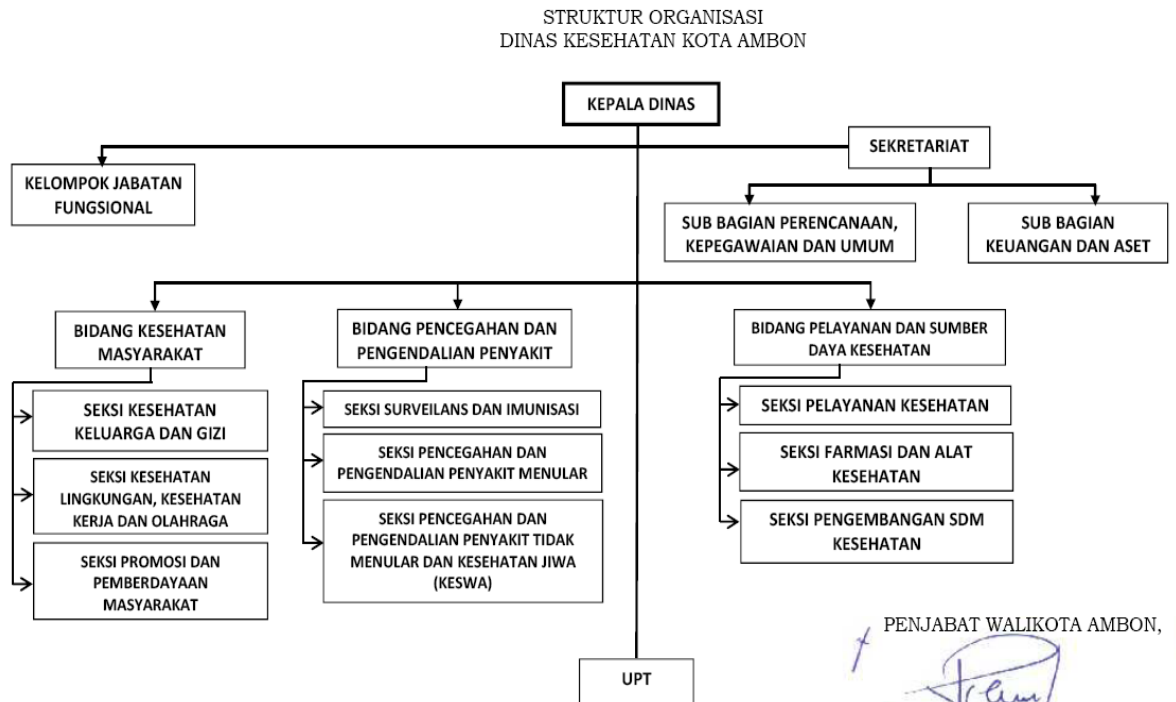
1. Menyiapkan penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan rencana operasional pada Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2. Melakukan pemantauan kegiatan Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan
3. Melakukan evaluasi terkait kegiatan di Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan
4. Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan seksi sebagai bahan masukkan bagi atasan
5. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
2. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
3. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
4. Memantau evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. STRUKTUR DINAS KESEHATAN KOTA AMBON

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 38 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 DESEMBER 2016
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

FRANS JOHANES PAPILAYA

1.2.ANALISIS ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Visi dan Misi Pemerintah Kota Ambon. Aspek-aspek tersebut antara lain :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Ambon tahun 2017 termasuk Puskesmas sebanyak 527 orang. Dari jenis ketenagaan pegawai Dinas Kesehatan terdiri dari: Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Administrasi Kesehatan, Bidan, Perawat, Oerawat Gigi, maupun tenaga non kesehatan. Dengan jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, ternyata masih terdapat kekurangan tenaga fungsional tertentu terutama untuk dokter umum, dokter gigi, analis laboratorium dan apoteker. Untuk tenaga non kesehatan, Dinas Kesehatan memerlukan beberapa orang tenaga teknologi dan informasi (IT).

Tabel. 1.1. Rekapitulasi Tenaga Dinas Kesehatan Kota Ambon Tahun 2017

NO	JENIS TENAGA	DINAS	FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Dokter Spesialis	0	5	5
2	Dokter Umum	3	15	18
3	Dokter Gigi	1	7	8
5	Administrasi Kesehatan	2	0	2
6	Bidan	3	90	93
7	Perawat	19	194	213
8	Perawat/Teknisi Gigi	1	14	15
9	Sanitarian	8	27	35
10	Gizi	6	39	45
11	Analisis Laboratorium	2	6	8
12	Farmasi	6	19	25
13	Kesehatan Masyarakat	7	3	10
14	Elektromedik	4	0	4
15	Non Kesehatan	22	26	48
16	JUMLAH	84	445	529

2. Aspek Sarana Kesehatan

Tabel 1.2. Data Sarana Kesehatan di Kota Ambon

NO	KECAMATAN	BALAI PENGOBATAN/ KLINIK	PUSKESMAS	PUSKESMAS PEMBANTU	RUMAH SAKIT	POS KESEHATAN DESA
1	Nusaniwe	2	6	13	2	13
2	Sirimau	4	8	2	4	6
3	Baguala	1	4	5	3	11
4	Tel. Ambon	1	2	8	1	12
5	Leitimur Selatan	-	2	8	0	8
		8	22	36	10	50

1.3.TUJUAN

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Ambon ini adalah untuk penilaian pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Ambon.

Visi Pemerintah Kota Ambon yaitu Ambon yang harmonis, sejahtera dan religious. Sedangkan misi Pemerintah Kota Ambon dijabarkan dalam 4 (empat) poin yakni:

1. Memperkuat dan mempererat harmonisasi sosial
2. Meningkatkan kualitas SDM
3. Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam
4. Meningkatkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat

Dasar yuridis penyusunan laporan kinerja Dinas Kesehatan Kota Ambon dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturauran Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.4.SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
disusun melalui sejumlah tahapan, meliputi :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1.RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Kesehatan tahun 2017-2022 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan periode 2017-2022 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2011-2016, analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Renstra tersebut juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan serta visi Pemerintah Kota Ambon.

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022 tersebut, telah ditetapkan visi dan misi Pemerintah Kota Ambon yang merupakan panduan atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategi organisasi.

Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan visi sebagai berikut:

AMBON YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN RELIGIOUS

Dalam rangka mencapai visinya, Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat dan mempererat harmonisasi sosial
2. Meningkatkan kualitas SDM
3. Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam
4. Meningkatkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat

**Tabel 2.1.Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Ambon
Tahun 2017-2022**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan dan peningkatan layanan kesehatan berkualitas sesuai standar	Meningkatnya Presentase Penduduk Menjadi Peserta JKN/KAS	Presentase penggunaan BPJS-JKN	40%	70%	80%	90%	100%	100%
			Presentase penerima KAS	0	30%	70%	90%	100%	100%
2		Meningkatnya aksesibilitas layanan kesehatan	1. Tersedianya tenaga kesehatan di sarana kesehatan	70%	80%	90%	95%	100%	100%
			2. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar	50%	60%	65%	70%	75%	80%
3		Meningkatnya layanan kesehatan yang berkualitas dan merata	1. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6. Cakupan pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			kesehatan pada usia produktif						
			7. Cakupan pelayanan kesehatan usia 60 tahun keatas sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			8. Presentase rumah tangga yang memiliki sanitasi dasar	60%	65%	70%	75%	80%	90%
			9. Presentase TPM yang memenuhi standar kesehatan	60%	65%	70%	75%	80%	90%
			10. Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	40%	45%	50%	55%	60%	60%
			11. Cakupan penemuan dan penanganan kasus gizi buruk	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4		Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penderita TB dan orang berisiko terinfeksi HIV/AIDS mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5		Meningkatnya ketersediaan penyebaran dan mutu obat serta sumber daya kesehatan	1. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase pengawasan peredaran obat di masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6		Meningkatkan partisipasi	Desa/Kelurahan siaga	50%	60%	70%	75%	80%	90%

		aktif masyarakat di bidang kesehatan							
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2.2. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi atau unit organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, target kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabel 2.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Ambon Tahun 2017

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2017)
1	Mewujudkan dan peningkatan layanan kesehatan berkualitas sesuai standar	Meningkatnya Presentase Penduduk Menjadi Peserta JKN/KAS	Presentase penggunaan BPJS-JKN	%	40
			Presentase penerima KAS	%	0
		Meningkatnya aksesibilitas layanan kesehatan	1. Tersedianya tenaga kesehatan di sarana kesehatan	%	70
			2. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar	%	50
		Meningkatnya layanan kesehatan yang berkualitas dan merata	1. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100

			2. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100
			3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100
			4. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar	%	100
			5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100
			6. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100
			7. Cakupan pelayanan kesehatan usia 60 tahun keatas sesuai standar	%	100
			8. Presentase rumah tangga yang memiliki sanitasi dasar	%	60
			9. Presentase TPM yang memenuhi standar kesehatan	%	60
			10. Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	40
			11. Cakupan penemuan dan penanganan kasus gizi buruk	%	100
		Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penderita TB dan orang berisiko terinfeksi HIV/AIDS mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100
		Meningkatnya ketersediaan penyebaran dan mutu obat serta sumber daya kesehatan	1. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	100
			2. Persentase pengawasan	%	100

			peredaran obat di masyarakat		
6		Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat di bidang kesehatan	Desa/Kelurahan siaga	%	50

2.3. IKHTISAR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Indikator kinerja Utama adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*) keluaran (*ouput*), hasil (*out comes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impack*).

Dinas Kesehatan telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuan yang tersebar melalui 5 (lima) sasaran dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas kesehatan Tahun 2017 tertuang pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kota Ambon Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016		2017		
		Target	Realisasi Target Pencapaian	Target	Realisasi Target Pencapaian	Capaian Kinerja
(1)	(2)			(6)	(7)	(8)
Angka Umur Harapan Hidup	Tahun	70	73.06	69.08	69,9	Baik Sekali
Angka kematian Ibu	/100.000 KLH	102/100.000 KLH (Target Nasional)	4 ibu	102/100.00 0 KLH. (Target Nasional)	3 ibu	Baik Sekali
Angka kematian Bayi	/1000 KLH	32/1000 KLH	33 bayi 4.5/1000 KLH	32/1000 KLH	24 bayi 3,4/1000 Klh	Baik Sekali
Angka kematian Balita	/1000 KLH	32/1000 KLH	22 balita 3.0/1000 KLH	32/1000 KLh	12 bayi 1,7/1000 klh	Baik Sekali

Cakupan penderita Gizi Buruk yang ditangani.	%	100	30 orang	100	15 orang	Baik Sekali
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	%	100	82.7	100	100	Baik Sekali
Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	81.8	100	100	Baik Sekali
Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	86.9	100	100	Baik Sekali
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar	%	100	100	100	100	Baik Sekali
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100	100	100	Baik Sekali
Persentase Rumah tangga Ber-PHBS	%	40	47 (34.260 KK)	40	46 (26.015 KK)	Baik Sekali
Cakupan Penemuan dan Penanganan kasus Gizi buruk	%	100	100 (30 balita)	100	100 (15 balita)	Baik Sekali
Presentase Penderita Hipertensi, DM dan Kesehatan Jiwa mendapatkan pelayanan sesuai Standar	%	100	100	100	100	Baik Sekali
Presentase Penderita TB dan orang beresiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	100	100	100	Baik Sekali
Presentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan	%	100	100	100	100	Baik Sekali
Presentase	%	100	100	100	100	Baik Sekali

Pengawasan Peredaran Obat Di Masyarakat						
Desa / Kelurahan Siaga	%	100	95 (45 Desa/Kel)	100 (50 Desa/Kel)	100	Baik Sekali

❖ Penjelasan Tabel

Aksesibilitas, pelayanan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Kota Ambon menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan Pemerintah Kota Ambon agar dapat menyediakan akses pelayanan dan Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang sesuai standar, baik tenaga maupun sarana dan prasarana kesehatan dalam menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Ketersediaan tenaga kesehatan sampai tahun 2017 sebanyak 529 orang yang terdiri dari: Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Administrasi Kesehatan, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, maupun tenaga non kesehatan. Dilihat dari jumlah tenaga kesehatan yang ada sudah mencukupi namun dari sisi kualitas serta persebaran tenaga sesuai fungsi belum sesuai dan merata di seluruh Puskesmas.

Pembangunan kesehatan dimulai dari unit terkecil dari masyarakat yaitu keluarga, melalui pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya secara aktif dengan mendatangi keluarga. Puskesmas bukan saja melayani di dalam gedung, melainkan juga diluar gedung yaitu dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya. Untuk mendukung pelaksanaan pendekatan keluarga tersebut perlu adanya penguatan Puskesmas sebagai salah satu ujung tombak yang didukung dengan sarana dan prasarana berupa alat kesehatan dan bangunan puskesmas yang sesuai dengan Permenkes 75 Tahun 2017. Untuk Puskesmas dengan data sesuai aplikasi sarana dan prasarana Puskesmas (ASPAK) yang menjadi target yang ada sampai dengan Tahun 2017 sudah 100% mencapai target.

Agar dapat terwujud sasaran di atas maka fokus pelayanan kesehatan Ibu dan Anak adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat terukur dengan menurunnya angka kematian bayi. Pada tahun 2017 Angka Kematian Bayi (AKB) dibawah umur 1 tahun sebanyak 24 bayi atau (3,4/1000 KLH). Jumlah angka kematian bayi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 sebesar 33 bayi atau (4,5/1000 KLH), angka tersebut masih lebih rendah dari Propinsi Maluku pada Tahun 2014 sebesar (12/1000 KLH) dan target MDG's tahun 2016

sebesar (32/1000). Angka Kematian Balita (AKB) tahun 2017 sebanyak 12 atau (1,7/1000 KLH) menurun dari tahun 2016 sebanyak 22 balita atau (3,0/1000 KLH), angka tersebut juga masih lebih rendah dari Propinsi Maluku tahun 2014 sebesar 7,36/1000 KLH dan target MDG's tahun 2015 sebesar 32/1000 KLH.

Diharapkan untuk dapat menekan angka kematian bayi dan balita, peningkatan pelayanan kesehatan terhadap bayi dan balita perlu didukung dengan program-program inovasi seperti : Promosi Kesehatan dan Pemberian Makanan Tambahan, Revitalisasi Posyandu Balita serta Pemberdayaan Masyarakat.

Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) di Kota Ambon tahun 2017 sebesar 3 ibu atau menurun dari tahun 2016 sebanyak 4 ibu, angka tersebut lebih rendah dari Propinsi Maluku ada tahun 2014 sebesar (29/100.000 KLH) dan target MDG's tahun 2015 sebesar (102/100.000 KLH). Indikator lain yang juga digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat yakni Umur Harapan Hidup (UHH) dimana untuk Kota Ambon telah mencapai 73,06 tahun 2015 lebih tinggi dari Provinsi Maluku 67,88 tahun 2013 dan 69,87 tahun, Indonesia tahun 2012 .

Untuk mengetahui status gizi bayi balita, telah dilaksanakan pengukuran berat badan terhadap 32.628 balita (64,9 %) dengan hasil prevalensi gizi buruk sebanyak (15) balita. Diabndingkan tahun 2016 yaitu sebanyak 30 balita, maka tahun 2017 mengalami penurunan jumlah prevalensi gizi buruk. Artinya, balita yang menderita gizi buruk telah tertangani atau tersentuh oleh pelayanan kesehatan. Upaya meningkatkan status gizi masyarakat telah dilakukan dengan Penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi keluarga.

Secara umum pengukuran pencapaian keberhasilan pembangunan kesehatan, disamping angka kematian (Mortalitas), maka keberhasilan pembangunan bidang kesehatan juga ditentukan oleh angka kesakitan (Morbiditas). Hal ini tergambar dengan adanya peningkatan pada kasus penyakit menular maupun tidak menular. Kasus yang diakibatkan oleh faktor lingkungan adalah Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) tahun 2017 terdapat 9 orang, jika dibandingkan tahun 2016 dimana terdapat 192kasus dengan jumlah penderita yang meninggal 10orang.

Penyakit Malaria mengalami penurunan kasus berdasarkan *Annual Parasite Incidence* (API) 1,87 kasus/1.000 penduduk pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 3,14 kasus/1.000 penduduk. Penurunan jumlah kasus ini merupakan trend positif dalam rangka eliminasi Malaria di Kota Ambon. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam usaha eliminasi Malaria yaitu:

1. Pelatihan petugas mikroskopis
2. *Mass Fever Survey*
3. Program tata laksana kasus yang merupakan kegiatan rutin

Penanggulangan penyakit TB Paru terus dilaksanakan untuk meningkatkan angka kesembuhan. Penyakit TB adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri *micro tuberculosis*. Pengobatan TBC dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah peningkatan jejaring TB dengan fasilitas kesehatan swasta (dokter dan apotik). Kunci sukses pengobatan TB adalah kepatuhan penderita dalam mengkonsumsi obat yang diprogramkan, karena penyakit tersebut masih merupakan ancaman utama dimasyarakat karena penularannya melalui percikan dahak. Sedangkan penyakit lain seperti diare maupun penyakit menular lainnya masih terdapat kasus tetapi tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Namun disisi lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah kasus penderita HIV/AIDS. Di tahun 2016 penderita HIV berjumlah 189 orang, penderita AIDS berjumlah 54, total jumlah penderita HIV/AIDS yaitu 243 orang dengan jumlah penderita yang meninggal 6 orang. Tahun 2017 jumlah penderita HIV adalah 168 orang, penderita AIDS 37 orang, total jumlah penderita HIV/AIDS adalah 205 orang. Dari jumlah 205 orang ini yang meninggal berjumlah 8 orang. Terjadi penurunan kasus jika dibandingkan dengan tahun 2016, dengan kasus yang ditemukan lebih dominan pada HIV. Penurunan jumlah kasus ini didukung dengan adanya deteksi dini untuk memutus mata rantai penularan sedini mungkin. Kegiatan lain yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan oleh Pemerintah Kota Ambon khususnya Dinas Kesehatan Kota Ambon adalah dengan melakukan mobile VCT dan IMS pada populasi berisiko tinggi, ibu hamil, pasien TB serta populasi umum. Beberapa Puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan adalah merupakan klinik VCT (*Voluntary Counselling and Testing*) dan IMS (Infeksi Menular Seksual), yaitu:

1. Kecamatan Nusaniwe: Puskesmas Amahusu, Puskesmas Air Salobar, Puskesmas Benteng, Puskesmas Waihaong.
2. Kecamatan Sirimau: Puskesmas Ch. M. Tiahahu, Puskesmas Kayu Putih, Puskesmas Karang Panjang, Puskesmas Waihoka, Puskesmas Air Besar
3. Kecamatan Baguala: Puskesmas Passo, Puskesmas Nania, Puskesmas Lateri
4. Kecamatan Teluk Ambon: Puskesmas Poka
5. Kecamatan Leitimur Selatan: Puskesmas Hutumuri

Selain itu terdapat juga Klinik Pengobatan yang melayani ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) yaitu Puskesmas Waihaong dan Puskesmas Karang Panjang.

❖ Promosi Kesehatan

Kegiatan promosi adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang lebih terarah pada penyadaran kemampuan melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai kultur budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Kegiatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) merupakan upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi dengan memberikan informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Untuk membantu masyarakat mengenali dan mengetahui masalahnya sendiri dalam tatanan rumah tangga agar dapat menerapkan cara-cara hidup bersih dan sehat dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya. Untuk itu upaya yang dilakukan merupakan tanggung jawab bersama bukan saja tenaga kesehatan (nakes) tapi juga masyarakat.

Tenaga kesehatan dalam lingkup Dinas Kesehatan diharapkan dapat menjadi teladan perilaku sehat dalam masyarakat dan melahirkan gerakan pemberdayaan masyarakat. Upaya dimaksud bukan saja menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata, namun menjadi tanggung jawab lintas sector terkait dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon. Hasil penyadaran masyarakat yang melaksanakan promosi kesehatan tergambar dari hasil Pemantauan PHBS Tahun 2015 dari jumlah Kepala Keluarga (KK) 108.352 terpantau dengan hasil survey KK yang ber-PHBS sebesar 57.010 KK atau sebesar 52,61% lebih jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 48% dari jumlah Kepala Keluarga yang disurvei 98.706.KK atau 78%.

Optimalisasi pemanfaatan Posyandu dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bentuk lomba posyandu tingkat Kota Ambon, telaah kemandirian UKBM, pelatihan pengobat tradisional ramuan/jamu. Pelatihan dokter kecil dan pengembangan multimedia dalam rangka penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik serta pengadaan KMS anak sekolah untuk mengetahui status gizi dan kesehatan anak sekolah, skrining murid kelas 1 SD (100%), pemeriksaan kesehatan berkala terhadap 34.927 murid SD atau (99,4%), 16.614 murid SMP atau (93,8%), dan 21.296 siswa SMU/SMK atau (23,8%). Desa Siaga Aktif 100% (50 Desa/Kel), selain itu kegiatan

pembinaan dan pengembangan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos Obat Desa dan kelompok Upaya Kesehatan Kerja (UKK). Selain itu melalui bantuan keuangan bersifat khusus Propinsi Maluku maka telah dilaksanakan pelatihan dokter Kecil tingkat Kota Ambon.

Perencanaan/pengadaan Obat, peningkatan pemerataan dan perbekalan kesehatan telah mencapai 100% pada sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya) guna mendukung peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas dalam melakukan upaya pelayanan terhadap masyarakat dengan berbagai penyakit dimasyarakat serta ditunjang dengan peningkatan mutu pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit.

Hal ini dibuktikan dengan persentase Instalasi Farmasi RS Pemerintah/Swasta yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 60%, persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 100%, persentase penggunaan obat generik di Puskesmas 93% dan Persentase Puskesmas Non Perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 73%, serta persentase penggunaan obat rasional antara lain penggunaan antibiotik ISPA non Pneumonia mencapai 66,3%, penggunaan antibiotik diare non spesifik 60,4 %, penggunaan injeksi mialgya 4,2 % dan rata-rata obat per resep 4,3 untuk setiap pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di Kota Ambon.

Selain itu juga untuk mendukung keamanan/kenyamanan serta menyiapkan fasilitas instalasi farmasi yang baik dan sesuai standar, maka di tahun 2016 dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sarana Penunjang Instalasi Farmasi pada gudang obat (Kota Jawa), pengadaan sarana penyimpanan dalam rangka menjaga kualitas dan mutu obat serta pengadaan sarana pengolahan data dalam rangka membenahi manajemen obat dan perbekalan kesehatan. Sedangkan untuk menyiapkan pelayanan laboratorium yang representatif, maka telah dilakukan rehabilitasi ruang pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat lebih baik dan terfokus pada pelayanan pemeriksaan kimia darah, darah dan urine rutin, Widal, HbsAg, tes kehamilan, narkoba, HIV, pemeriksaan Haji, sedangkan di Puskesmas hanya melakukan pemeriksaan laboratorium dasar.

❖ Masalah dan Kendala yang Dihadapi

Masalah-masalah kesehatan yang dihadapi Tahun 2017 adalah :

a. Pada program kesehatan Ibu dan Anak sbb:

1) Masih adanya kematian Ibu Hamil, bayi.dan balita.

Disebabkan : terlambatnya keluarga mengambil keputusan merujuk ke sarana kesehatan lanjutan.

2) Masih ada gizi buruk pada balita

Disebabkan : Pola asuh orang tua yang kurang

- . Kurangnya Pengetahuan Ibu
- . Faktor ekonomi keluarga.
- . Kurangnya Pelihatan ibu
- . factor penyakit yang menyertai.

3) Belum semua BUMIL K1 mendapat pelayanan (Tentang Layanan Pencegahan Penularan HumanImmunodeficiency Virus Dari Ibu ke Anak)

4) Belum semua Pasien TB diskriming HIV/AIDS

b. Solusi dari permasalahan diatas:

1. Mutu pelayanan kesehatan harus lebih ditingkatkan lagi kepada ibu hamil, bayi, masyarakat (perorangan maupun keluarga).
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan bagi perempuan sebelum hamil terutama pada masa remaja yang menjadi faktor penting dalam Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
3. Tingkatkan promosi dan Pemberdayaan masyarakat (Germas)
4. Perlu meningkatkan Kompetensi Kemampuan petugas Program (Bidan) dalam penanganan Kesehatan Ibu maupun Anak.
5. Perlu meningkatkan Kompetensi Kemampuan petugas Program (Bidan) dalam penanganan Kesehatan Ibu maupun Anak
6. Lebih tingkatan Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan Meningkatkan SDM Promkes.
7. Tingkatkan pelayanan penanggulangan kesehatan penyakit menular maupun tidak menular.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic. Esensi pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan menggunakan program atau kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan perubahan pada level output, hasil maupun dampak.

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip *good governance* dengan pilarnya akuntabilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan amndat suatu instansi dalam pelayanan public yang bias langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program atau kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah tercapai.

Dalam rangka pengembangan system AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Penghitungan nilai realisasi kinerja ini telah dilakukan pada Sistem AKIP secara elektronik (e-sakip).

Capaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun bersangkutan dengan tahun lalu
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kota Ambon
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran strategis diberlakukan nilai disertai makna nilai tersebut, yaitu:

- 85% s/d 100% : Baik Sekali
- 70% s/d <85% : Baik
- 55% s/d <69% : Cukup
- < 55% : Kurang

3.1.1. TARGET DAN REALISASI KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA AMBON

Indikator kinerja Utama adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*) keluaran (*ouput*), hasil (*out comes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impack*).

Dinas Kesehatan telah berupaya untuk mewujudkan Misi dan tujuan yang tersebar melalui 5 (lima) sasaran dan 20 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).maupun penetapan indikator kinerja program. Pencapaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas kesehatan Tahun 2017, tertuang pada table di dawah ini :

Tabel 3.1.Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kota Ambon Tahun 2017

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI TARGET PENCAPAIAN		CAPAIAN KINERJA
			Tahun		
			2016	2017	
Angka Umur Harapan Hidup	UMUR	69.08 Thn	73.06 thn	69.9 thn	
Angka kematian Ibu	/100.000 KLH	102/100.000 KLH. (Target Nasional)	4 (ibu)	3 (Ibu)	Baik Sekali
Angka kematian Bayi	/1000 KLH	32/1000 KLH	33 bayi 4,5/1000 KLh	24 bayi 3,4/1000 Klh	Baik Sekali
Angka kematian Balita	/1000 KLH	32/1000 KLh	22 balita (3,0/1000 Klh)	12 bayi 1,7/1000 klh	Baik Sekali

Cakupan penderita Gizi Buruk yang ditangani.	%	100	100 (30 orang)	100 (15 orang)	Baik Sekali
-Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil (K4).	%	100	82,7	100	Baik Sekali
-Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin sesuai standart	%	100	81,8	74	Baik Sekali
-Cakupan Pelayanan kesehatan Bayi Baru lahir sesuai standart	%	100	86,9	100	Baik Sekali
-Cakupan Pelayanan kesehatan Balita pneumonia	%	100	100	100	Baik Sekali
-Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak usia Pendidikan Dasar sesuai standart	%	100	100	100	Baik Sekali
Presentase Rumah tangga BerPHBS	%	40	47 (34.260 KK)	46 (26.015 KK)	Baik Sekali
Cakupan Penemuan dan Penanganan kasus Gizi buruk	%	100	100 (30 balita)	100 (15 balita)	Baik Sekali
Presentase Penderita Hipertensi, DM dan Kesehatan Jiwa mendapatkan pelayanan sesuai Standar	%	100	100	100	Baik Sekali
Presentase Penderita TB dan orang beresiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	100	100	Baik Sekali
Presentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan	%	100	100	100	Baik Sekali
Presentase Pengawasan Peredaran Obat Di Masyarakat	%	100	100	100	Baik Sekali
Desa / Kelurahan Siaga	%	100	95 (45 Desa/Kel)	100 (50 Desa/Kel)	Baik Sekali

Dengan data perbandingan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) antara tahun 2016 dan 2017, dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi target pencapaian sebesar 100%. Sesuai dengan penilaian tersebut diatas maka dapat dikatakan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Ambon adalah Baik Sekali.

3.1.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DENGAN TAHUN LALU

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan realisasi kinerja tahun 2016 dengan realisasi tahun 2017 sesuai dengan tabel 3.2. di bawah ini:

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2017
Dinas Kesehatan Kota Ambon

NO	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016			INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017		
				URAIAN	TARGET	CAPAIAN	URAIAN	TARGET	CAPAIAN
	Angka Umur Harapan Hidup (UHH)			Peningkatan Umur Harapan Hidup		73,09 Tahun	Peningkatan Umur Harapan Hidup	69.08 Thn	69,9 thn
1	Meningkatnya presentase penduduk menjadi peserta JKN/KAS			Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	0	0	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	0	0
2	Meningkatnya layanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Angka Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Menurunnya angka kematian ibu	102/100.000 KLH (Target Nasional)	4 ibu	Menurunnya angka kematian ibu	102/100.000 KLH. (Target Nasional)	3 ibu
		Angka Kematian Bayi dibawah 1 tahun	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi (umur kurang 1 tahun)}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun}} \times 1000$	Menurunnya angka kematian bayi	32/1000 KLH (Target Nasional)	33 bayi 4,5/1000 KLH	Menurunnya angka kematian bayi	32/1000 KLH	24 bayi 3,4/1000 Klh

		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi (umur kurang 5 tahun)}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun}} \times 1000$	Menurunnya angka kematian balita	32/1000 KLH (Target Nasional)	22 balita 3.0/1000 KLH	Menurunnya angka kematian balita	32/1000 KLh	12 bayi 1,7/1000 klh
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk}} \times 100\%$	Menurunnya penderita gizi buruk	100%	30 orang	Menurunnya penderita gizi buruk	100%	15 orang
		Kunjungan Ibu Hamil yang memperoleh Pelayanan Antenatal K4	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil memperoleh layanan antenatal K4}}{\text{Jumlah semua sasaran ibu hamil}} \times 100\%$	Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	82.7%	Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh nakes}}{\text{Jumlah seluruh ibu bersalin}} \times 100\%$	Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	81.8%	Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	100%
		Cakupan kunjungan bayi	$\frac{\text{Jumlah kunjungan bayi yang mendapat pelayanan sesuai SOP}}{\text{Jumlah seluruh bayi}} \times 100\%$	Meningkatkan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir	100%	86.9%	Meningkatkan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir	100%	100%
				Meningkatnya pelayanan kesehatan pada anak balita	100%	100%	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada anak balita	100%	100%
				Meningkatnya pelayanan kesehatan pada anak usia dasar	100%	100%	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada anak usia dasar	100%	100%

				Bertambahnya jumlah rumah ber-PHBS	40%	47% (34.260 rt)	Bertambahnya jumlah rumah ber-PHBS	40%	46 (26.015 rt)
				Terlaksananya penemuan dan penanganan kasus gizi buruk oleh nakes	100%	100 (38 balita)	Terlaksananya penemuan dan penanganan kasus gizi buruk oleh nakes	100	100 (15 balita)
3	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular			Terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap Penderita Hipertensi, DM dan Kesehatan Jiwa	-	-	Terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap Penderita Hipertensi, DM dan Kesehatan Jiwa	100%	100% (Hipertensi 14026 orang, Penderita DM 6047 orang)
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	$\frac{\text{Jumlah seluruh penderita TBC BTA yang ditangani sesuai SOP}}{\text{Jumlah seluruh penderita TBC BTA yang ditemukan}} \times 100\%$	Terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap Penderita TB dan orang berisiko Terinfeksi HIV	-	-	Terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap Penderita TB dan orang berisiko Terinfeksi HIV	100%	100% Penderita TB : 1586 orang Penderita HIV/AIDS 5800 orang
4	Meningkatnya ketersediaan penyebaran dan mutu obat serta sumber daya kesehatan			Jumlah ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan di seluruh Puskesmas	100%	100%	Jumlah ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan di seluruh Puskesmas	100%	100%
				Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran obat di masyarakat	100%	100%	Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran obat di masyarakat	100%	100%
5	Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat di Bidang Kesehatan			Meningkatnya Desa/Kelurahan Siaga	100%	95% (45 Desa/Kel)	Meningkatnya Desa/Kelurahan Siaga	100%	100 (50 Desa/Kel)

Pada tahun 2016 rata-rata realisasi capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Ambon sebesar 100% (SeratusPersen)dari target kinerja yang telah direncanakan. Pada tahun 2017 rata-rata realisasi capaian kinerja 100%, hal ini berarti Dinas Kesehatan Kota Ambon dapat mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga mampu mempertahankan rata-rata realisasi capaian kinerja.

3.1.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET JANGKA MENNEGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA AMBON

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dan dibandingkan dengan dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kesehatan Kota Ambon.Perbandingan inti untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah SKPD. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada grafik 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai dengan Tahun 2017 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Ambon

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Capaian Indikator Kinerja 2016	Capaian Indikator Kinerja 2017
1	Mewujudkan dan peningkatan layanan kesehatan berkualitas sesuai standar	Meningkatnya Presentase Penduduk Menjadi Peserta JKN/KAS	Presentase penggunaan BPJS-JKN	40%		
			Presentase penerima KAS	0	0	0
2		Meningkatnya aksesibilitas layanan kesehatan	1. Tersedianya tenaga kesehatan di sarana kesehatan	70%	65%	70%
			2. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar	50%	2 Puskesmas	8 Puskesmas
			3. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	82.7%	100%
			4. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100%	81.8%	100%
			5. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	72% (30.033)	64%
			6. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar	100%	72% (Data estimasi 30.033)	64% (Data real 33.323)
			7. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	100%	100%
			8. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	100%	100%
			9. Cakupan pelayanan kesehatan usia 60 tahun keatas sesuai standar	100%	100%	100%
			10. Presentase rumah tangga yang memiliki sanitasi dasar	60%	90.88 %	91.77 %
			11. Presentase TPM yang memenuhi standar kesehatan	60%	52.3% (157 TPM)	62% (186 TPM)
			12. Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	40%	47% (34.260 KK)	46% (26.015 KK)

			13. Cakupan penemuan dan penanganan kasus gizi buruk	100%	100% (30 balita)	100% (15balita)
3		Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penderita TB dan orang berisiko terinfeksi HIV/AIDS mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	100% TB: 1586 HIV/AIDS:5800
4		Meningkatnya ketersediaan penyebaran dan mutu obat serta sumber daya kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	100%	100%
			Persentase pengawasan peredaran obat di masyarakat	100%	100%	100%
5		Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat di bidang kesehatan	Desa/Kelurahan siaga	50%	95% (45 Desa/Kel)	100% (50 Desa/Kel)

3.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

a. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya layanan kesehatan yang berkualitas dan merata

Pentingnya jaminan kesehatan bagi setiap orang adalah hal yang wajib, karena dengan jaminan kesehatan itu merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, kita juga tidak pernah tahu kapan akan sakit sehingga jaminan kesehatan itu sangat diperlukan. Melalui program Nawacita yang diusung oleh pemerintahan Joko Widodo dengan agenda meningkatkan kualitas hidup manusia, program JKN ini adalah program Pemerintah Pusat dan program KAS yang merupakan program dari Pemerintah Kota Ambon dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia dan khususnya juga bagi masyarakat Kota Ambon. Oleh karena itu dengan program JKN/KAS ini diharapkan seluruh masyarakat di Kota Ambon khususnya bagi warga kurang mampu dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang prima.

Untuk mengukur kinerja peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata, pada tahun 2016 jumlah penerima bantuan JKN sudah mencapai target 100%, begitu pula di tahun 2017. Sehingga program pemerintah pusat yaitu JKN sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Ambon. Namun, pada tahun 2016 dan 2017, penerima layanan jaminan kesehatan KAS (Kartu Ambon Sehat) belum dilaksanakan sehingga target pencapaian kinerja untuk penerima KAS masih 0%.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya layanan kesehatan yang berkualitas dan merata

Target pencapaian indikator tahun 2016 dan 2017 untuk Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Cakupan Penderita Gizi Buruk Ditangani, Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4), Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Pneumonia, Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar, Presentase Rumah Tangga Ber-PHBS, Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus Gizi Buruk, Presentase Penderita Hipertensi, DM (Diabetes Mellitus) dan Kesehatan Jiwa, Presentase Penderita TB dan orang beresiko Terinfeksi HIV/AIDS, Presentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Presentase Pengawasan Peredaran Obat di Masyarakat serta Desa/Kelurahan Siaga, telah mencapai target 100%.

Artinya, dari keseluruhan indikator pelayanan diatas, masyarakat telah memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Kecenderungan penyakit tidak menular terus meningkat dan telah mengancam sejak usia muda. Selama dua dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Indonesia sedang mengalami *double burden* penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit tidak menular utama meliputi jantung, stroke, hipertensi, diabetes mellitus, kanker dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan dengan cara proaktif mendatangi sasaran, karena sebagian besar tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Sedangkan prioritas penyakit menular, masih tertuju pada penyakit HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah, influenza dan flu burung. Berbagai program telah dibuat dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2017 dan dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke daerah untuuk mengendalikan persebaran atau penularan penyakit menular tersebut sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil dengan pencapaian target 100% di tahun 2016 dan 2017 dalam menekan angka kesakitan maupun persebaran penyakit menular dan tidak menular.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya ketersediaan penyebaran dan mutu obat serta sumberdaya kesehatan

Dalam pelayanan kesehatan, obat dapat menyelamatkan kehidupan dan meningkatkan kualitas kesehatan. Akses terhadap obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintahan di semua level, baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Renstra Kementerian Kesehatan terdapat 12 sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 2015-2019. Sasaran yang terkait dengan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah sasaran keempat, yaitu meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai. Mengacu dari Renstra Kementerian Kesehatan inilah maka ketersediaan, penyebaran dan mutu obat serta sumberdaya kesehatan di tahun 2016 dan 2017 telah mencapai target kinerja 100%. Hal ini dapat dibuktikan dengan

ketersediaan obat di fasyankes Kota Ambon yaitu 22 Puskesmas tersedia dengan baik untuk dapat memenuhi kebutuhan pengobatan masyarakat Kota Ambon.

Sasaran Strategis 5: Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat di bidang Kesehatan

Partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa terlibat dan merasa menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. Hal ini akan sangat berdampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program. Partisipasi masyarakat di bidang kesehatan adalah dimana individu, keluarga maupun masyarakat umum ikut serta bertanggungjawab terhadap kesehatan diri, keluarga atau kesehatan masyarakat di lingkungannya. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan bukan semata-mata karena ketidakmampuan pemerintah dalam upaya pembangunan, melainkan memang disadari bahwa masyarakat mempunyai hak dan potensi untuk mengenal dan memecahkan masalah kesehatan yang dihadapinya, mengingat sebagian besar masalah kesehatan disebabkan oleh perilaku masyarakat itu sendiri. Salah satu kegiatan yang merupakan partisipasi masyarakat adalah dengan pembentukan Desa/Kelurahan siaga. Desa/Kelurahan siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Di tahun 2016 pencapaian kinerja untuk pembentukan Desa/Kelurahan siaga masih mencapai 95%, hal ini disebabkan karena Desa/Kelurahan masih belum memenuhi kriteria penduduk yang belum seluruhnya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dan pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM). Oleh karena itu pada tahun 2017 untuk meningkatkan capaian pembentukan Desa/Kelurahan Siaga maka seluruh fasilitas kesehatan (Puskesmas, Pustu, Poskesdes) mulai kembali diaktifkan untuk dapat memenuhi kebutuhan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat. Selain itu masyarakat pun dilibatkan secara langsung untuk menjadi penggerak dalam berbagai kegiatan kesehatan.

3.1.5. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Secara umum Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Ambon menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Ambon, namun demikian Program/Kegiatan tersebut akan selalu dilakukan review apakah dalam tahun bersangkutan terdapat program atau kegiatan yang harus segera dilaksanakan mengingat kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Ambon juga mengacu pada kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mana kebijakan tersebut sangat sulit diprediksi pada awal tahun.

Tabel 3.4. Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Ambon Tahun 2017

Indikator	Program	Kegiatan	Target 2017	Capaian
a. Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan dengan target 70 %	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin, dengan target 100%	1. Pelayanan operasi bedah Plastik	100%	100%
		2. Pelayanan sunatan masal	100%	100%
		3. Pelayanan Operasi Urologi	100%	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target 100%	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%
		5. Pemeliharaan Berkala Peralatan Lab. Gigi, IPAL, Generator dan Peralatan Kesehatan lainnya	100%	100%
		6. Pengadaan Meubiler Puskesmas	100%	100%
Tersedianya Tenaga Kesehatan di Sarkses sesuai Standart dengan target 70%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7. Pendidikan dan Pelatihan Formal.	100%	100%

	dengan target 100%			
		2. Pelatihan BONELS untuk Tenaga Bidan Puskesmas	100%	100%
		3. Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk	100%	100%
		4. Pelatihan dan Magang Asuhan Persalinan Normal	100%	100%
		5. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas	100%	100%
Tersedianya sarana Kesehatan di Sarkes sesuai Standart dengan target 70%	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/pembantu dan jaringannya dengan target 100%	1. Pembangunan Puskesmas	100%	100%
		2. Pengadaan Peralatan Kesehatan Klinik Mata AV	100%	100%
		3. Rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan Kota Ambon Jaringannya	100%	100%
		4. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas/Pustu dan Sarana Penunjangnya	100%	100%
		5. Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas Penunjangnya	100%	100%
		6. Pengadaan Sarana Prasaran Puskesmas Air Salobar	100%	100%
		7. Pengadaan Peralatan Incenerator	100%	100%
		8. Rehabilitasi Total Puskesmas Urimesing dan Sarana Penunjangnya Tahun 2016 (DAK)	100%	100%
		9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (siswa 2016)	100%	100%
		10. Rehabilitasi Sedang Berat Puskesmas dan Jaringannya (2016)	100%	100%
		11. Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas Rawat Inap dan Sarana Penunjangnya (siswa 2016)	100%	100%
		12. Pembangunan Puskesmas Pembantu (siswa 2016)		
		13. Rehabilitasi Sarana Penunjang (Pagar) Puskesmas Waihoka (siswa 2016)	100%	100%

Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu melahirkan ,dan Anak . sesuai standart dengan target (100%)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1. Pertemuan (Reviuw) Audit Maternal dan Perinatal Keluarga Kurang Mampu	100%	100%
		2. Pertemuan PWS dan Evaluasi Program KIA	100%	100%
		2. Pertemuan PWS dan Evaluasi Program KIA	100%	100%
		2. Pertemuan PWS dan Evaluasi Program KIA	100%	100%
Cakupan Pelayanan kesehatan Balita sesuai standart dengan target (100%)	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1. Pengadaan KIT Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	100%	100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak usia Pendidikan Dasar sesuai standart dengan target (100%)	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Lomba Dokter kecil	100%	100%
Cakupan Pelayanan kesehatan bagi Usia 60 Tahun keatas sesuai standart target (100%)	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan	100%	100%
Prosentase Rumah tangga yang memiliki Sanitasi Dasar dengan target (60%)	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Inspeksi Sanitasi SAB dan Pengambilan Sampel Air	100%	100%
		2. Kaporisasi Sarana Air Bersih	100%	100%
		3. Standarisasi TTU dan TPM	100%	100%
		4. Pemeriksaan Laboratorium dan Bakteriologi	100%	100%
Prosentase TPM yang memenuhi standart Kesehatan dengan target (60%)	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	1. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Makan	100%	100%

		2. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restouran	100%	100%
Prosentase Rumah tangga BerPHBS dengan target (40%)	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	100%	100%
		2. Monitoring, Evaluasi Pelaporan	100%	100%
		3. Stratifikasi dan Lomba Posyandu Tingkat Kota Ambon	100%	100%
		4. Pameran Kesehatan tahun 2017	100%	100%
		5. Pengadaan Stiker dan Kartu Rumah PHBS	100%	100%
		6. Pembinaan dan Pengembangan UKS	100%	100%
		7. Kampanye KTR	100%	100%
Cakupan Penderita Hipertensi, Penderita DM dan Penderita Kesehatan Jiwa mendapat pelayanan sesuai standart	Program Pencegahan dan Pengulangan Penyakit Menular	1. Pengendalian Penyakit Tidak Menular	100%	100%
Cakupan Penderita penyakit Malaria, orang beresiko Terinfeksi HIV/AIDS dan penyakit Filariasis mendapatkan pelayanan sesuai standart dengan target 100%	Program Pencegahan dan Pengulangan Penyakit Menular	1. Pencegahan Pengulangan Penyakit Endemik/Epidemik	100%	100%
		2. Peningkatan surveylance epidemiologi dan pengulangan wabah	100%	100%
		3. Pelayanan Pencegahan dan Pengulangan Penyakit Malaria 4. Peningkatan Pengulangan HIV/AIDS dan IMS	100%	100%
		5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Surveylance Penyakit Menular (sis 2016)	100%	100%

		6. Pelayanan Pencegahan dan Pengulangan Penyakit Filariasis (siswa 2016)	100%	100%
Presentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan dengan target 100%	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100 %	100%
		2. Distribusi Obat-Obatan dan Sisten E-Logistic Obat	100%	100%
		3. Pembangunan Sarana Instalasi Farmasi Kate-Kate	100%	100%
		4. Penyediaan Sarana Instalasi Pendukung Farmasi	100%	100%
Presentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan dengan target 100%	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100 %	100%
		2. Distribusi Obat-Obatan dan Sisten E-Logistic Obat	100 %	100%
		3. Pembangunan Sarana Instalasi Farmasi Kate-Kate	100 %	100%
		4. Penyediaan Sarana Instalasi Pendukung Farmasi	100 %	100%
Cakupan desa /kelurahan siaga dengan target 50%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengembangan Desa Siaga	100%	100%

3.2. REALISASI ANGGARAN

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Pagu Belanja : | Rp.93.349.687.017,20.- |
| a. Belanja tidak langsung | Rp.39.396.699.125,- |
| b. Belanja langsung | Rp.53.952.987.892,- |
| c. Belanja Pegawai | Rp. 1.300.410.000,- |
| d. Belanja barang dan jasa | Rp.29.252.767.167,- |
| e. Belanja Modal | Rp. 22.158.185.472.- |

2. Total Belanja: Rp.78.665.452.538.-(84,26%)

Realisasi :

- a. Belanja tidak langsung Rp.38.606.524.258,-(98,%)
- b. Belanja langsung Rp.40.058.928.280.-(69 %)
- c. Belanja Pegawai Rp.310.750.000.-
- d. Belanja barang dan jasa Rp.24.625.757.254,5.-
- e. Belanja Modal Rp.15.122.421.025,5-.

Untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Ambon, anggaran yang diperoleh selain sumber dan dari APBD murni juga bersumber dari dana DAK dan JKN, dengan rincian sebagai berikut:

- DAK sebesar

Pagu : Rp.26.275.550.800,-

Realisasi : Rp. 18.345.450.850.-

- Dana Kapitasi JKN dalam DPA-Perubahan :Rp. 14.332.499.161.-Sedangkan Realisasi : Rp.10.936.408.030.-.

BAB IV

PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan lakip tahun 2017 berpedoman peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi pelaksanaan sasaran kinerja Dinas Kesehatan tergambar pada capaian Kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan Indikator-indikator satuan pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian program dan kegiatan.

Pencapaian kinerja secara program/kegiatan telah terealisasi dengan hasil capaian 100% yang tersebar dalam 14 Program dan 60 kegiatan (tabel terlampir) sedangkan pencapaian berdasarkan Indikator kinerja Utama (IKU) memuaskan jelas tergambar pada table Indikator Utama (IKU) namun masih ada masalah - masalah kesehatan yang dihadapi. Dengan demikian kedepan perlu terus menerus tingkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Secara menyeluruh dengan berbagai program/kegiatan Inovatif untuk tingkatkan pencapaian kinerja yang lebih optimal.

Ambon, Januari 2018

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Ambon



drg. Wendy Pelupessy. M. Kes

Pembina Tkt I.

Nip. 19680424 200003 2 008